



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN

#bangga
melayani
bangsa



SELAMAT

MINGGU KE- **5** JULI 2025

KEMENKUM KALSEL NEWS



PEMBINAAN
APEL PAGI



PELANTIKAN NOTARIS
PENGANTI



RAKOR EVALUASI
KINERJA

DIVISI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PEMBINAAN HUKUM

DIVISI
PELAYANAN HUKUM

BAGIAN
TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



kemenkumkalsel



@kemenkumkalsel



kalsel.kemenkum.go.id

Apel Pagi Senin: Kakanwil Kemenkum Kalsel Tegaskan Komitmen Kinerja dan Apresiasi Dedikasi Pegawai



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) kembali menggelar apel pagi rutin pada Senin (28/7/2025) di halaman kantor. Apel yang berlangsung dari pukul 07.50 hingga 08.15 WITA ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari, dan dibina langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem.

Dalam amanatnya, Kakanwil menekankan pentingnya apel pagi sebagai bentuk kedisiplinan dan kebersamaan antar pegawai. Ia menyampaikan bahwa apel merupakan bukti kesiapan dalam bekerja sekaligus menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi.

“Apel pagi memiliki makna baik sebagai bukti kesiapan kita dalam mengerjakan tugas, sekaligus menjadi momen memperkuat kebersamaan di antara kita,” ujar Alex.

Alex juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai yang telah mengikuti apel secara tertib serta turut serta dalam kegiatan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana.

Mengakhiri amanatnya, ia mengingatkan seluruh jajaran untuk terus memaksimalkan pelaksanaan kinerja, terutama menjelang akhir bulan Juli, agar seluruh target yang telah direncanakan dapat dicapai sesuai harapan.

Ia turut menyampaikan bahwa para pejabat pimpinan tinggi (Pimti) telah mengikuti Uji Potensi dan Manajerial Sosial Kultural (Mansoskul) sebagai bagian dari pemetaan SDM oleh Kementerian Hukum. Selanjutnya akan dilaksanakan juga Rapat Koordinasi Capaian Kinerja Semester I yang akan diikuti oleh para Pimti serta Kepala Bagian TU dan Umum.

“Kami berharap ke depan seluruh pelaksanaan kegiatan maupun kinerja dapat semakin maksimal,” tutupnya.

Apel pagi ditutup dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan.

Kemenkum Kalsel Lantik Notaris Pengganti di Kota Banjarmasin, Pastikan Layanan Hukum Tetap Berjalan



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Notaris Pengganti di Kota Banjarmasin, Senin (28/07). Pelantikan ini dilaksanakan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kenotariatan selama notaris yang bersangkutan menjalani cuti.

Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, secara langsung melantik dan mengambil sumpah dua orang notaris pengganti yang akan melaksanakan tugas sementara waktu. Adapun notaris yang sedang menjalani cuti adalah yaitu : Notaris Gigih Anangda Perwira, S.H., M.Kn., yang melaksanakan cuti selama 15 hari, terhitung mulai tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan 11 Agustus 2025. Selama masa cuti tersebut, tugas kenotariatan akan dijalankan oleh Notaris Pengganti Sdri Annastasya Nestiti Putri, S.H.

Selanjutnya, Notaris Mery Liana, S.H., M.Kn., yang melaksanakan cuti selama 5 hari, terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan 8 Agustus 2025. Untuk itu, Notaris Pengganti Rika Mega Mustika, S.H. ditunjuk melaksanakan tugas selama periode tersebut. Sesuai ketentuan, penyerahan protokol notaris wajib dilakukan pada saat dimulainya cuti dan satu hari setelah cuti berakhir.

Dalam arahannya, Alex menekankan bahwa pelantikan Notaris Pengganti bukan sekadar seremoni formal, melainkan wujud kehadiran negara dalam menjamin kesinambungan layanan hukum kepada masyarakat.

“Saya meminta Notaris Pengganti melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan memastikan setiap layanan sesuai dengan norma profesi notaris,” ujar Alex.

.Ia juga mengingatkan bahwa wewenang notaris pengganti sama dengan notaris definitif. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian tinggi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Kenali profil pengguna jasa. Jangan ada keberpihakan, dan harus tetap netral sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku,” pesannya.

Lebih lanjut, Alex juga menegaskan pentingnya pelaporan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai bagian dari akuntabilitas dan pengawasan profesi notaris.

“Kepada Saudari Notaris Pengganti yang baru dilantik, saya mengingatkan untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas, etika profesi, dan prinsip perlindungan hukum bagi para pengguna jasa. Selamat atas pelantikan ini. Semoga amanah yang telah diterima dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi tegaknya nilai-nilai hukum, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris,” tutupnya.

Pelantikan ini menjadi bukti komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam menjaga kontinuitas layanan hukum dan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum melalui jasa kenotariatan.

Menkum: Posbankum Dibentuk Sebagai Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan



Palembang, 28 Juli 2025 - Seluruh Desa dan Kelurahan sebanyak 3.258 di 17 Kabupaten/Kota Sumatera Selatan secara resmi telah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Posbankum adalah wadah bagi masyarakat desa/kelurahan untuk mendapatkan layanan informasi/konsultasi, penyelesaian sengketa/konflik melalui mediasi oleh Paralegal dan Kepala Desa/Lurah sebagai Juru Damai, dan layanan rujukan advokat baik pro bono maupun Organisasi Bantuan Hukum. Terbentuknya 3.258 Posbankum menggenapi jumlah Posbankum secara nasional yang sudah terbentuk menjadi 10.470 Pos.

Peresmian Posbankum yang digelar di Griya Agung, Palembang, Senin (28/7) dilakukan oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas didampingi oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen serta dihadiri oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Andi Rian serta unsur Muspida dan Bupati/Walikota.

Atas capaian tersebut, Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) menganugerahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan atas rekor pembentukan Posbankum pertama pada seluruh desa/kelurahan di satu provinsi.

“Saya mengapresiasi bantuan Pak Gubernur untuk mendorong hadirnya Posbankum, Ini adalah untuk pertama kalinya sebuah provinsi 100 persen Desa/Kelurahannya ada Posbankum, saya yakin keadilan bisa hadir secepatnya di Sumatera Selatan dan akan menjadi percontohan baik bagi wilayah lainnya”, ungkap Menteri Hukum yang hadir langsung di Acara Peresmian Posbankum di Palembang, Sumatera Selatan.

Menteri Hukum juga menekankan bahwa aspek hukum dan keadilan adalah program prioritas yang tertera dalam asta cita Presiden Prabowo. Presiden selalu menekankan, Hukum adalah jaminan keadilan dan keadilan adalah tuntutan setiap warga negara dan negara harus melakukan pemenuhan layanan akses terhadap keadilan.

Menurut Menteri Hukum, pembentukan Posbankum dan pelatihan paralegal adalah langkah konkret Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mempermudah masyarakat memperoleh akses keadilan hingga ke tingkat desa/kelurahan. Setelah melakukan peresmian Posbankum dan pembukaan pelatihan Paralegal, Menteri Hukum meninjau Posbankum yang berada di Kantor Kelurahan Lima Ilir, Kota Palembang.

Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum yang telah menjadi inisiator dan mendorong program Posbankum Desa/Kelurahan.

“Keberhasilan capaian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dalam pembentukan Posbankum tidak mungkin terwujud tanpa sinergi dengan Kementerian Hukum,” ujar Gubernur Herman Deru.

Herman Deru juga yakin dengan terbentuknya Posbankum keadilan dan penegakan supremasi hukum akan lahir Bumi Sriwijaya.

“Posbankum harus responsif, aktif dan solutif” tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya keberlanjutan pengembangan Posbankum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan 9 Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui penempatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Posbankum.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintaa Suburian menegaskan bahwa sinergi yang solid antara berbagai pihak tidak boleh berhenti sampai dengan peresmian saja.

“Keberhasilan ini adalah buah kerja sama erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat sipil. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan akan terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak guna memastikan pelayanan Posbankum berjalan dengan baik,” tegasnya.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Sumatera Selatan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan secara menyeluruh.

“Capaian Sumatera Selatan adalah bukti nyata bahwa negara hadir hingga ke tingkat paling dasar untuk menjamin hak masyarakat terhadap keadilan. Ini menjadi teladan strategis yang menginspirasi kami di Kalimantan Selatan untuk memperkuat peran Posbankum dalam menjangkau warga hingga pelosok,” ujar Alex.

Ia menegaskan bahwa komitmen Kementerian Hukum di daerah tidak hanya sebatas memperluas jangkauan, tetapi juga memastikan kualitas layanan hukum yang responsif dan inklusif melalui penguatan kapasitas paralegal dan kolaborasi multipihak.

“Semangat gotong royong seperti yang dicontohkan oleh Sumatera Selatan akan kami lanjutkan dalam konteks lokal Kalimantan Selatan sebagai bagian dari misi besar Presiden dan Menteri Hukum untuk menghadirkan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.



Kanwil Kemenkum Kalsel Koordinasikan Penilaian IRH dan Upaya Penguatan WBK ke Badan Strategi Kebijakan dan DJKI



Jakarta, Humas_Info – Dalam rangka mendukung pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) serta memperkuat layanan bantuan hukum di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Anton E. Wardhana, melakukan koordinasi ke Badan Strategi Kebijakan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Senin (28/7/2025).

Bertempat di Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum RI, Kadiv P3H mewakili Kanwil Kemenkum Kalsel menyampaikan laporan pelaksanaan IRH di Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus membahas kendala yang dihadapi sejumlah kabupaten/kota. Dalam pertemuan dengan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Junarlis, terungkap bahwa beberapa daerah seperti Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Tapin telah diverifikasi namun belum melaksanakan penilaian mandiri. Sementara itu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum sepenuhnya mengunggah data dukung. Adapun provinsi dan sembilan kabupaten lainnya dinyatakan telah memenuhi proses verifikasi dan penilaian mandiri.

Usai koordinasi tersebut, Kadiv P3H juga melanjutkan pertemuan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam dialog dengan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsasongko, disampaikan permohonan dukungan testimoni dari para artis di bawah naungan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Testimoni ini diharapkan dapat mendukung pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kanwil Kemenkum Kalsel, serta memperkuat eksistensi dan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di daerah.

Menurut Kadiv P3H, pembentukan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan merupakan langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, menyelesaikan sengketa secara damai, serta meningkatkan kesadaran dan pendampingan hukum di tingkat akar rumput.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kinerja reformasi hukum dan pelayanan bantuan hukum yang lebih merata serta berdampak langsung kepada masyarakat.

Kanwil Kemenkum Kalsel Serahkan Sertifikat Merek kepada Dinas Koperasi Banjarbaru dan Disbudporapar Tanah Bumbu



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui layanan Kekayaan Intelektual (KI). Pada Senin (28/7), Kanwil Kemenkum Kalsel menyerahkan sertifikat merek kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarbaru serta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Tanah Bumbu.

Bertempat di Ruang Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, kegiatan ini menjadi ajang koordinasi sekaligus konsultasi layanan KI yang langsung dihadiri oleh jajaran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarbaru serta Disbudporapar Tanah Bumbu.

Sebanyak 21 sertifikat merek diterbitkan dari total 26 permohonan yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Banjarbaru, serta 11 sertifikat merek dari Disbudporapar Tanah Bumbu. Seluruhnya merupakan hasil pendaftaran merek tahun 2024.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel, Riswandi, menegaskan bahwa pendampingan teknis sangat penting dalam proses pendaftaran merek.

“Kami menyambut baik inisiatif dari pemerintah daerah yang aktif memfasilitasi pendaftaran merek bagi UMKM binaan. Tapi yang lebih penting lagi adalah edukasi teknis agar permohonan merek dapat diterima tanpa penolakan,” ujar Riswandi.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Layanan KI memberikan tips dan arahan agar permohonan merek bisa lolos proses pemeriksaan substantif, salah satunya dengan melakukan pencarian awal pada basis data Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI).

Selain membahas perlindungan merek, Tim Layanan KI juga mendorong kedua dinas untuk memperluas cakupan perlindungan kekayaan intelektual, termasuk pendaftaran hak cipta dan potensi destinasi wisata sebagai kekayaan daerah yang perlu dicatat secara hukum.

“Kekayaan intelektual tidak hanya sebatas merek dagang. Inovasi dan ciptaan pun bisa didaftarkan, termasuk potensi wisata lokal yang bisa menjadi identitas daerah. Perlindungan hukum ini penting agar tidak diklaim pihak lain,” tambah Riswandi.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarbaru serta Disbudporapar Tanah Bumbu juga menyampaikan harapannya agar Tim Layanan KI Kanwil Kemenkum Kalsel dapat terus memberikan pendampingan dalam sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM di daerah.

Kegiatan ini menjadi salah satu wujud sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalsel dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan kekayaan intelektual di kalangan pelaku usaha lokal.



Kawal Arah Pembangunan Tabalong, Kemenkum Kalsel Bahas Detail RDTR Perkotaan Muara Uya dan Jaro



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kembali melaksanakan rapat harmonisasi untuk memastikan keselarasan antara rancangan peraturan perundang-undangan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi. Kali ini, Selasa (29/07) harmonisasi dilakukan terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Tabalong, yakni Ranperbup tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Muara Uya dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Jaro.

Rapat ini dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjahtul Mardhiah, bersama tim Perancang dari Kanwil Kemenkum Kalsel Kegiatan berlangsung di ruang rapat Kanwil Kemenkum Kalsel dan melibatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Dari pihak Pemkab Tabalong hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Wibawa Agung, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Norma Zahriati, serta perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperida), Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, Camat Jaro, dan tim konsultan penyusun RDTR Kecamatan Muara Uya.

Kepala Dinas PUPR Tabalong, Wibawa Agung, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa penyusunan Ranperbup RDTR untuk Kecamatan Jaro dan Muara Uya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum tata ruang,



membuka peluang investasi, serta menata dan membangun kawasan perkotaan secara terstruktur di dua kecamatan tersebut.

Rapat harmonisasi berjalan konstruktif dengan pembahasan yang mendalam mulai dari judul, konsideran, hingga pasal demi pasal. Tim perancang Kanwil Kemenkum Kalsel memberikan masukan serta penyelarasan agar Ranperbup yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan terselenggaranya rapat ini, diharapkan Ranperbup RDTR Kawasan Perkotaan Muara Uya dan Jaro dapat segera ditetapkan dan menjadi dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Tabalong.





Kemenkum Kalsel Fasilitasi Harmonisasi Ranperbup HSS tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan



Banjarasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) memfasilitasi Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Hulu Sungai Selatan (HSS) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kegiatan berlangsung pada Selasa (29/7), di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan.

Rapat dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Eryck Yulianto, mewakili Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut permohonan fasilitasi harmonisasi dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap regulasi yang akan menjadi pengganti Perbup Nomor 22 Tahun 2021.

Turut hadir dalam rapat antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda HSS, Zulkifli; Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UKM dan Perindustrian HSS, Syamsuddin; serta Kepala Bagian Hukum Setda HSS, Fitri beserta jajaran.

Dalam sambutannya, Eryck Yulianto menjelaskan bahwa proses harmonisasi merupakan bagian penting dari pembentukan peraturan daerah untuk memastikan kesesuaian substansi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Harmonisasi dilakukan untuk menjamin bahwa setiap norma dalam Ranperbup tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, serta menjunjung asas keterbukaan, kesesuaian, dan keterpaduan," ujar Eryck.

Ranperbup yang dibahas dalam rapat ini mengatur secara komprehensif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup pekerja formal, informal, jasa konstruksi, pekerja rentan, hingga pekerja migran.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat HSS, Zulkifli, menyatakan bahwa regulasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperluas cakupan perlindungan sosial.

"Dengan adanya regulasi ini, kami berharap seluruh pekerja, baik yang berada dalam hubungan kerja maupun yang mandiri, dapat memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan yang layak," tutur Zulkifli.

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel memberikan masukan normatif dan teknis dalam proses harmonisasi, termasuk penyesuaian struktur dan redaksional agar sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan berlangsung dalam suasana diskusi yang konstruktif dan kolaboratif. Proses harmonisasi ini menjadi wujud nyata dukungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam memastikan regulasi daerah memberikan perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat pekerja di daerah.



100% Desa/Kelurahan di Sumatera Selatan Miliki Posbankum, Raih Rekor MURI dan Jadi Percontohan



Palembang - Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil mewujudkan capaian bersejarah dalam pemerataan akses keadilan di Indonesia. Provinsi Sumsel resmi dinobatkan sebagai provinsi pertama yang telah membentuk pos bantuan hukum (posbankum) di seluruh 3.258 desa/kelurahan, sehingga cakupannya mencapai 100 persen tanpa terkecuali.

“Saya mengapresiasi Gubernur Sumsel atas keberhasilannya menjadikan Sumsel sebagai provinsi pertama di Indonesia yang telah 100 persen membentuk posbankum di setiap desa/kelurahan di Provinsi Sumsel. Hal ini tentunya dapat menjadi contoh bagi provinsi lainnya di Indonesia,” kata Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas saat meresmikan posbankum desa/kelurahan di Griya Agung, Palembang, Senin (28/07/2025).

Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pun memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel atas pencapaian ini, sekaligus menjadi pengakuan terhadap keberhasilan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dibawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum.

Hadirnya posbankum di desa/kelurahan, lanjut Supratman, diharapkan menjadi solusi strategis untuk semakin mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat, khususnya ditingkat desa/kelurahan.



“Masyarakat tidak hanya sadar hukum, tapi juga mandiri dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di antara mereka secara bijak dan damai, tanpa harus melalui proses peradilan. Hal ini akan sangat membantu berbagai pihak, baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Mahkamah Agung sebagai pintu keadilan terakhir,” lanjut Supratman.

Selain posbankum desa/kelurahan, Kemenkum juga secara resmi memulai pelatihan paralegal, yang akan diikuti oleh 6.687 peserta dari 17 kabupaten/kota di Sumsel. Paralegal akan diberikan pelatihan dan supervisi oleh 14 Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi, dengan Kemenkum Sumsel sebagai fasilitator guna meningkatkan kapasitas paralegal agar mampu memberikan layanan bantuan hukum cepat dan tepat kepada masyarakat desa.

Sebagai wujud apresiasi kepada seluruh mitra kerja Kemenkum di wilayah, Menkum memberikan penghargaan kepada gubernur, walikota, dan bupati atas dukungan dalam pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan Provinsi Sumsel. Dalam kunjungannya ke Palembang, Menkum juga melakukan peninjauan langsung ke Posbankum Kelurahan Lima Ilir untuk memastikan standar layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Kemudian sebagai bagian dari upaya keberlanjutan, Kanwil Kemenkum Sumsel pada kesempatan ini menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan 9 Fakultas Hukum di Sumsel, di antaranya Universitas Sriwijaya, Universitas Kader Bangsa, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Palembang, Universitas Sjakhyakirti, Universitas IBA, UIN Raden Fatah Palembang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, dan Universitas Taman Siswa. Kesepakatan ini untuk mendorong keterlibatan akademisi melalui penempatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di posbankum desa/kelurahan.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyampaikan apresiasi kepada Kemenkum yang telah menjadi inisiator dan penggerak utama program ini.

“Keberhasilan Sumsel mencapai 100 persen posbankum tidak mungkin terwujud tanpa komitmen dan kerja keras Kemenkum. Program ini sejalan dengan visi kami menjadikan Sumsel sebagai provinsi inklusif, sadar hukum, dan berkeadilan sosial,” ungkap Herman Deru.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menambahkan bahwa capaian ini adalah hasil sinergi yang solid antara berbagai pihak.

“Ini adalah hasil kerja sama erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat sipil. Kemenkum Sumsel berperan sebagai motor penggerak untuk memastikan seluruh desa/kelurahan mendapatkan pendampingan,” tegas Kepala Kanwil.

Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel memastikan pihaknya akan memantau, membina, dan memperkuat keberlanjutan program ini melalui peningkatan kompetensi paralegal dan pembudayaan hukum melalui posbankum kelurahan/desa sebagai fondasi keadilan sosial di Sumsel. Kemenkum berkomitmen untuk memperluas pembentukan posbankum kelurahan/desa ke seluruh Indonesia.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, turut memberikan apresiasi atas capaian yang diraih oleh Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan. Ia menilai, terwujudnya 100 persen Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa/kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan menjadi tonggak penting dalam sejarah pelayanan hukum berbasis masyarakat.

“Capaian Kanwil Kemenkum Sumsel patut dijadikan inspirasi bagi kami. Ini bukan sekadar rekor, tapi bentuk nyata hadirnya negara dalam menjamin akses keadilan sampai ke lapisan masyarakat paling bawah,” ujar Alex.

Lebih lanjut, Alex menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan untuk mereplikasi model yang telah berhasil di Sumsel dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lokal.

“Kami akan menjadikan keberhasilan ini sebagai pemacu semangat untuk memperkuat penyebarluasan layanan bantuan hukum di Kalimantan Selatan. Inovasi seperti penempatan paralegal dan kolaborasi dengan perguruan tinggi juga sangat strategis untuk memperkuat akar budaya hukum di desa,” pungkasnya.





Kemenkum Kalsel Ikuti Evaluasi IKPA Semester I Tahun 2025 bersama Biro Keuangan Setjen



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara hybrid pada Selasa (29/07/2025). Kegiatan ini diikuti oleh 33 Kantor Wilayah dan 5 Balai Harta Peninggalan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Acara dibuka oleh Ketua Tim Biro Keuangan dan dilanjutkan dengan paparan evaluasi dari Biro Keuangan terkait capaian pelaksanaan anggaran secara nasional. Evaluasi diawali dari Ditjen AHU yang menyampaikan laporan dan analisis realisasi anggaran kepada seluruh satuan kerja di bawah koordinasinya.

Dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, kegiatan ini diikuti secara daring oleh jajaran Tim Pengelola Keuangan, Bendahara, serta Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU). Partisipasi aktif jajaran teknis ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil dalam memastikan keterpaduan data, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Kegiatan evaluasi IKPA ini dilaksanakan selama beberapa hari, mulai tanggal 29 hingga 31 Juli 2025, dengan jadwal evaluasi per unit eselon I yang telah ditentukan dalam DIPA.

Dalam evaluasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyampaikan capaian anggaran Semester I Tahun 2025 sebagai berikut:

- Pagu Awal: Rp4.304.938.000
- Pagu Blokir: Rp3.514.838.000
- Pagu Efektif: Rp790.100.000
- Realisasi: Rp404.246.744
- Persentase Realisasi dari Pagu Efektif: 51,16%
- Outstanding Kontrak: Rp. 116.666.655
- Dana Tersedia: Rp. 269.186.601

Sementara itu, untuk capaian IKPA, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan berhasil meraih skor maksimal, yaitu 100,00 pada seluruh indikator penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa Kanwil telah mencapai target IKPA sekaligus memenuhi 100% realisasi terhadap revisi DIPA yang ditetapkan. Prestasi ini menjadikan Kanwil Kalsel sebagai salah satu satuan kerja dengan pengelolaan anggaran terbaik di lingkungan Ditjen AHU.

Ke depan, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut dengan langkah-langkah strategis, seperti optimalisasi pelaksanaan kegiatan, percepatan proses pencairan anggaran, serta penyerapan yang akuntabel dan tepat waktu, khususnya pada Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2025.

Evaluasi IKPA ini menjadi bagian penting dari penguatan tata kelola anggaran yang transparan, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Hukum.

Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Rapat Koordinasi SATGAS PASTI Tahun 2025 Bahas Dugaan Pergadaian Tanpa Izin



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Hukum menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Anggota Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (29/07) bertempat di Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Dewi Woro Lestari beserta staf.

Rapat koordinasi ini dirangkaikan dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema Tindak Lanjut Penanganan Dugaan Usaha Pergadaian Tanpa Izin di Kalimantan Selatan, yang merupakan bentuk tindak lanjut pengawasan terhadap maraknya entitas usaha pergadaian yang belum mengantongi izin resmi sesuai Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Dalam sambutannya, Dewi Woro Lestari menegaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mendukung penuh langkah-langkah pemberantasan aktivitas keuangan ilegal melalui keikutsertaan aktif dalam SATGAS PASTI Provinsi Kalimantan Selatan.

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan cepat, layanan pergadaian menjadi alternatif yang diminati. Namun, di sisi lain, ditemukan praktik usaha pergadaian tanpa izin yang berisiko merugikan konsumen dan menciptakan ketidakpastian hukum. Berdasarkan hasil pengawasan dan laporan masyarakat, OJK bersama aparat penegak hukum mengidentifikasi adanya dugaan praktik pergadaian tanpa izin di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemetaan, verifikasi lapangan, serta langkah koordinatif antar pemangku kepentingan.



Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari OJK, Polda Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Para peserta menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kerja sama dalam bentuk edukasi, sosialisasi, serta penindakan hukum terhadap entitas ilegal. OJK bersama SATGAS PASTI akan menindaklanjuti hasil diskusi dengan langkah konkret guna mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, legal, dan berintegritas.



Auditorium Pengayoman Pancasila BPSDM Hukum Diresmikan Menteri Hukum



Depok – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, meresmikan Gedung Auditorium Pengayoman Pancasila pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum yang digelar di lingkungan BPSDM Hukum.

Auditorium ini mendapatkan nama baru “Pengayoman Pancasila” pada masa kepemimpinan Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, sebagai simbol bahwa seluruh proses pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Hukum harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. “Lingkungan pengembangan SDM harus senada guna menanamkan Pancasila kepada peserta pelatihan,” ujarnya.

Gedung Auditorium BPSDM Hukum telah berdiri sejak tahun 1983 pada masa Departemen Kehakiman. Pemugaran pertama dilakukan pada tahun 2018 untuk lantai 1, sedangkan renovasi terkini dilakukan pada bagian dalam lantai 2. Peremajaan ini bertujuan menyesuaikan fungsi gedung dengan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan yang lebih modern dan mendukung pemanfaatan teknologi terkini.

Dengan wajah baru Auditorium Pengayoman Pancasila, diharapkan penyelenggaraan kegiatan, pelatihan, dan berbagai program strategis Kementerian Hukum dapat berlangsung lebih optimal dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi.

"Peresmian Auditorium Pengayoman Pancasila menjadi simbol komitmen Kementerian Hukum dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap proses pengembangan SDM. Kami di Kanwil Kalimantan Selatan mendukung penuh upaya ini sebagai fondasi penguatan kinerja dan pengembangan sumber daya manusia ASN," ungkap Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem.

Sinergi Kuat, Kinerja Hebat: Pimti Kemenkum Kalsel Ikuti Rakor Evaluasi Kinerja Semester I



BDepok, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Depok, Selasa (29/07).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 29 hingga 31 Juli 2025 ini dibuka langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas. Dalam arahannya, Menteri Hukum menekankan pentingnya pengendalian sebagai instrumen untuk memastikan kinerja kementerian tetap berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran strategis.

“Pengendalian kinerja bukan hanya sekadar evaluasi administrasi, tapi bentuk konkret dari komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi. Kinerja yang tinggi lahir dari perencanaan yang terarah, pelaksanaan yang konsisten, dan pengendalian yang objektif,” ujar Menteri Hukum dalam sambutan pembukaannya.

Mengusung tema “Kementerian Hukum Semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan Sinergi yang Kuat sebagai Pilar Keberhasilan Kinerja,” Rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian target kinerja kementerian selama semester pertama tahun 2025, sekaligus memperkuat koordinasi pusat dan wilayah dalam implementasi program prioritas.

Kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan pemaparan materi oleh narasumber dari KemenPAN-RB, BPKP, dan Kementerian Keuangan. Agenda dilanjutkan dengan pembukaan resmi Rakor yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Kemenkum, doa bersama, hingga penayangan video pengendalian kinerja.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Komjen Pol. Nico Afinta turut memberikan laporan pelaksanaan kegiatan, sebelum akhirnya acara dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum.

“Dengan forum ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh unit kerja, baik di pusat maupun wilayah, memiliki persepsi dan semangat yang sama dalam mewujudkan kinerja terbaik,” ungkap Sekjen dalam laporannya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem menyampaikan bahwa keikutsertaan aktif dalam forum ini merupakan komitmen pihaknya dalam meningkatkan capaian kinerja yang berorientasi pada hasil.

“Kami menjadikan Rakor ini sebagai momentum evaluasi dan refleksi. Ini saatnya kita menyatukan kekuatan untuk menjawab tantangan implementasi program kerja, terutama yang langsung berdampak pada layanan publik,” ujar Alex usai sesi pembukaan.

Selain kegiatan pleno, Rakor juga dirangkai dengan pembahasan komisi yang terbagi ke dalam enam kelompok isu strategis, yaitu Dukungan Manajemen, Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, Pelayanan Hukum AHU dan Kekayaan Intelektual, yang diikuti oleh para Kepala Kanwil dan Kepala Divisi sesuai pibidangnya.

PNBP Naik, Kinerja Meningkat, Kementerian Hukum Prioritaskan Program Utama Presiden Prabowo



Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mencatatkan sejumlah capaian kinerja pada periode April-Juni (triwulan II) tahun 2025. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyebutkan bahwa capaian Kemenkum mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.

Di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kemenkum telah menyelesaikan 3.163.862 permohonan dari total 3.176.756 permohonan yang masuk. Permohonan-permohonan tersebut terkait layanan hukum perdata, hukum pidana, badan usaha, hukum tata negara, dan otoritas pusat dan hukum internasional. Capaian itu mengalami kenaikan sebesar 1,15% dibandingkan dengan triwulan II tahun 2024, yaitu dari 98,44% menjadi 99,59%. Dari keseluruhan layanan ini, Kemenkum telah mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp271.349.516.152,- atau naik 1,04% dibandingkan triwulan II tahun 2024 Rp268.533.216.195,-.

Supratman menjelaskan, dalam pelayanan badan usaha, di triwulan II ini Kemenkum fokus mendukung program Presiden Prabowo untuk pendirian Koperasi Daerah Merah Putih. Hingga saat ini, Kemenkum telah memfasilitasi pendaftaran 80.081 Koperasi Desa Merah Putih sebagai badan hukum

“Kemenkum sudah mengesahkan lebih dari 80 ribu atau tepatnya 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ini adalah bentuk kolaborasi yang dipimpin Kemenko Pangan dan dibantu berbagai instansi lainnya seperti Kemendagri, Kementerian Koperasi, TNI/Polri, dan Pemda setempat.

Layanan ini didukung transformasi digital layanan publik mengakselerasi program prioritas pemerintah yang berfokus pada pemerataan ekonomi dari tingkat desa,” ucap Supratman di gedung BPSDM Kemenkum, Selasa (29/7/2025).

Dalam kurun waktu April-Juni ini, Kemenkum juga berhasil menyelesaikan proses naturalisasi kepada empat atlet sepak bola putri. Mereka adalah Felicia de Zeeuw, Iris de Rouw, Isa Warps, dan Emily Nahon.

Selanjutnya, di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Kemenkum telah menerima 82.661 permohonan KI yang didominasi oleh permohonan hak cipta sebanyak 41.855 dan permohonan merek sebanyak 33.613. Permohonan lainnya adalah paten, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, serta mutasi dan lisensi. Total penyelesaian permohonan KI selama semester I 2025 adalah sebanyak 192.187. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan semester I Tahun 2024, yang saat itu diselesaikan sebanyak 109.326 permohonan.

Dari layanan KI, Kemenkum memperoleh PNBP triwulan II sebesar sebesar Rp240.858.057.844,- Jumlah ini naik 11,24% dibandingkan triwulan II tahun 2024 yang berjumlah Rp 216.502.871.826,-

“Kenaikan capaian pelayanan KI ini dipengaruhi oleh transformasi digital yang mempercepat keseluruhan proses pelayanan KI,” ungkapnya.

Kemudian, di bidang Peraturan Perundang-undangan, Kemenkum tengah menyiapkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Nasional. Dalam kurun waktu triwulan II, RUU KUHAP berada dalam tahap penyusunan DIM. Dan pada bulan Juli, telah dilaksanakan pembahasan DIM bersama DPR. Sementara itu, RUU Narkotika dan Psikotropika serta RUU Perubahan UU 37/2004 (Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) berada dalam proses penyusunan RUU yang melibatkan antar kementerian. Selain itu, RUU Jaminan Benda Bergerak dalam tahap harmonisasi.

“Kita memerlukan penggantian KUHAP untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu, karena adanya perubahan pada sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang, serta konvensi internasional yang telah diratifikasi di Indonesia,” ujar Menkum Supratman.

Pada April-Juni 2025, Kemenkum telah menyelesaikan 3.422 proses harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dari total 3.623 permohonan harmonisasi. Proses harmonisasi ini dilakukan bagi peraturan perundang-undangan di berbagai bidang, yaitu bidang Politik, hukum, Hak Asasi Manusia, Pemerintahan, Pertahanan, dan Keamanan, Imigrasi, Pemasyarakatan, Komunikasi, Informasi, Digitalisasi dan Peradilan; bidang Kesejahteraan Masyarakat; bidang Perekonomian; serta Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Berikutnya, bidang pembinaan hukum nasional, Kemenkum telah memberikan 2.045 bantuan hukum litigasi dan 542 bantuan hukum non litigasi. Supratman menjelaskan bahwa Kemenkum menargetkan pendirian 7.000 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tahun ini untuk pemerataan akses hukum bagi masyarakat. Pada triwulan II, jumlah Posbankum sudah bertambah sebanyak 8.706 Posbankum. Dengan demikian, total Posbankum yang terbentuk di semester I telah melebihi target di angka 10.470.

Kemenkum terus meningkatkan kompetensi dan partisipasi masyarakat untuk memberikan bantuan hukum. Hingga Juni 2025, terdapat 15.092 peserta pelatihan paralegal yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kemenkum juga meningkatkan kapasitas kepala desa dan lurah sebagai Non-Litigation Peacemaker (NLP). Hingga Juni 2025, sebanyak 1.023 kepala desa dan lurah telah mengikuti Peacemaker Training.

“Penyelenggaraan pelatihan paralegal dan bekerjanya paralegal pada Posbankum berada di bawah supervisi organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang menaunginya, guna menjamin dan memastikan kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Menteri kelahiran Sulawesi ini.

Dalam bidang strategi kebijakan, Kemenkum menyediakan layanan jurnal elektronik (e-Journal) yang merupakan platform digital untuk menyajikan berbagai karya ilmiah. Di triwulan II, terdapat tiga jurnal terbitan Kemenkum yang terakreditasi SINTA 2, yaitu lima artikel di Jurnal Hukum De Jure, lima artikel Jurnal HAM, dan lima artikel Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH). Ketiga jurnal tersebut telah mencapai total halaman dilihat sebanyak 48.825. Kemenkum juga memublikasikan hasil-hasil kajian dan analisis kebijakan dalam buku versi elektronik yang bisa diakses masyarakat melalui <https://ebook-bsk.kemenkumham.go.id/>.

“Hasil kajian kami dapat diakses secara daring untuk berbagai keperluan, seperti untuk pengambilan kebijakan, tujuan akademis, ataupun penelitian,” kata Supratman.

Ada pula layanan Kemenkum di bidang pengembangan SDM. Kemenkum menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan, baik untuk internal maupun eksternal Kemenkum. Pada periode April-Juni 2025, tercatat sebanyak 34.637 peserta telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan dalam berbagai metode, di antaranya webinar, klasikal, MOOC, Community of Practice (CoP), pembelajaran jarak jauh, maupun secara hybrid.

Di bidang kesekretariatan, telah dilakukan dukungan kerja sama antara Kementerian Hukum dengan 20 kementerian/lembaga yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman. Kerja sama ini dilakukan untuk mendukung pelayanan dan pembangunan hukum di Indonesia. Layanan terakhir, ungkap Supratman, adalah layanan inspektorat Jenderal. Ia menyatakan kalau Kemenkum telah menindaklanjuti 131 temuan dari total 321 temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Supratman menyebutkan Kemenkum terus berupaya memberikan layanan yang terbaik, transparan, dan akuntabel agar masyarakat memperoleh kepastian hukum. Transformasi digital menjadi langkah strategis Kemenkum dalam rangka reformasi birokrasi pelayanan publik. Supratman menargetkan semua pelayanan Kemenkum telah berbasis digital di tahun 2026.

“Kami yakin pelayanan berbasis digital akan lebih cepat, efisien, kolaboratif, dan inklusif bagi masyarakat. Masyarakat semakin mudah mengakses semua layanan yang ada di Kemenkum,” tutup Supratman.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, melihat capaian kinerja Kementerian Hukum pada triwulan II ini merupakan cerminan nyata dari arah kebijakan yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Kami di Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan sangat mendukung konsistensi jajaran pusat dalam meningkatkan layanan publik berbasis digital yang inklusif dan responsif. Kenaikan signifikan PNBK serta jumlah layanan yang diselesaikan menunjukkan kepercayaan publik terhadap layanan hukum yang terus tumbuh. Terlebih lagi, pengesahan puluhan ribu Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk konkret kontribusi Kemenkum dalam mendukung pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Kami akan terus memperkuat pelaksanaan program-program ini di Kalsel, termasuk peningkatan kualitas layanan AHU, KI, pembinaan hukum, hingga harmonisasi regulasi di daerah agar sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional,” ucapnya.

Kemenkum Kalsel Gelar Harmonisasi Raperda Ketertiban Umum Kabupaten Banjar



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Banjar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat. Kegiatan ini digelar di Balai Pertemuan Garuda dan dipimpin langsung oleh Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Eryck Yulianto, Rabu (30/07/2025).

Dalam arahannya, Eryck menekankan pentingnya kesesuaian materi muatan Raperda dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

“Harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan substansi Raperda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum di daerah,” ujarnya.

Raperda yang dibahas ini mengatur berbagai aspek ketertiban, mulai dari ketertiban jalan dan lingkungan, penertiban pedagang kaki lima, penanganan reklame, hingga upaya pelindungan masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas.

Pada kesempatan tersebut, jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah juga aktif memberikan berbagai saran dan masukan terhadap materi Raperda yang diajukan. Masukan tersebut antara lain menyangkut penguatan norma larangan dan sanksi administratif, penyesuaian definisi istilah agar tidak multitafsir, serta pentingnya mempertegas peran masyarakat dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Diharapkan melalui proses harmonisasi ini, Raperda yang dihasilkan akan lebih implementatif, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, dan mampu menjawab kebutuhan serta dinamika sosial yang ada di Kabupaten Banjar.

Dukung Percepatan Pemeriksaan Substantif, Kemenkum Kalsel Asistensi Gula Aren Tirawan Kotabaru



Kotabaru, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan asistensi percepatan pemeriksaan substantif lapangan terhadap produk indikasi geografis Gula Aren Tirawan di Kabupaten Kotabaru, Selasa (29/7/2025).

Bertempat di Kantor Bupati Kotabaru, kegiatan ini dibuka dengan audiensi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kotabaru, di antaranya Asisten II Murdianto, Sekretaris Daerah Eka Saprudin, Staf Ahli Bupati Bidang SDM Jurainah, serta perwakilan dari Bapperida, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pertanian.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel, Riswandi, menyampaikan bahwa asistensi ini merupakan langkah penting sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif lapangan yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai 29 hingga 31 Juli 2025.

"Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam rangka memastikan kesiapan dokumen deskripsi indikasi geografis Gula Aren Tirawan, serta koordinasi lintas sektor untuk kelancaran pemeriksaan di titik-titik lokasi produksi," ujar Riswandi.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Layanan KI menyampaikan sejumlah poin penting, antara lain perlunya penyesuaian terhadap dokumen deskripsi, kesiapan lokasi pemeriksaan sesuai yang tercantum dalam dokumen, serta pelibatan seluruh SKPD terkait oleh Pemkab Kotabaru. Pemeriksaan akan dilakukan dengan dua metode utama, yakni wawancara dan pengamatan langsung.

Riswandi menambahkan, hasil akhir dari pemeriksaan substantif lapangan ini akan dilaporkan pada hari terakhir kegiatan sebagai bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mendukung perlindungan produk indikasi geografis daerah.

Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Asisten II dan Sekretaris Daerah menyatakan dukungan penuh atas pelaksanaan kegiatan ini, sekaligus menegaskan kesiapan daerah dalam mendorong pengakuan hukum terhadap produk lokal unggulan.



Hari Kedua Rakor, Kakanwil Kemenkum Kalsel: Ruang Strategis untuk Evaluasi dan Sinkronisasi Kinerja



Depok, Humas_Info — Hari kedua pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum Tahun 2025 berlangsung dengan agenda utama pembahasan komisi. Bertempat di BPSDM Hukum, Depok, kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem.

Turut hadir mendampingi Kakanwil dalam Rakor ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka serta Tim Kerja Pengelolaan Perencanaan Anggaran dan Laporan.

Dalam agenda hari kedua, seluruh peserta Rakor dibagi ke dalam komisi-komisi berdasarkan unit kerja dan fokus pembahasan. Kakanwil Kemenkum Kalsel tergabung dalam Komisi 2 (B) yang membahas isu-isu strategis pada bidang Pembinaan Hukum. Adapun Kepala Divisi Yankum masuk ke Komisi 3 (B) yang fokus pada Kekayaan Intelektual, Kepala Divisi P3H berada di Komisi 2 (A) terkait Peraturan Perundang-undangan, dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum pada Komisi 1 (A) yang membahas dukungan manajemen, perencanaan, BMN, dan keuangan.

Dalam keterangannya, Kakanwil Alex Cosmas Pinem menegaskan bahwa pembahasan komisi menjadi bagian penting dalam upaya evaluasi dan penajaman arah kebijakan ke depan.

“Rakor ini bukan hanya ajang untuk mengevaluasi capaian kinerja semester I, tetapi juga ruang strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, dan mengidentifikasi solusi atas berbagai tantangan di lapangan,” ujar Alex.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya keselarasan program di tingkat wilayah dan pusat agar sasaran kinerja Kementerian Hukum dapat tercapai secara optimal.

“Kami di daerah tentu harus memastikan bahwa seluruh target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan kementerian dapat diimplementasikan dengan baik. Untuk itu, forum ini sangat penting sebagai momen penyelarasan,” tambahnya.

Setelah masing-masing komisi menyelesaikan sesi pembahasannya, agenda Rakor dilanjutkan dengan finalisasi hasil pembahasan komisi dalam sesi pleno pada akhir kegiatan hari kedua.

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang mampu memperkuat kinerja Kementerian Hukum secara menyeluruh, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan publik baik di pusat maupun di daerah.



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Evaluasi IKPA Semester I TA 2025: Upayakan Kesesuaian RPD dengan Realisasi



Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti dari ruang rapat Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, dan diikuti oleh jajaran pengampu tugas Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Kanwil Kemenkum Kalsel.

Evaluasi ini bertujuan untuk menelaah capaian IKPA serta menyusun strategi optimalisasi kinerja anggaran di setiap satuan kerja. Kegiatan berlangsung interaktif dan penuh antusiasme, dengan sesi tanya jawab yang dimanfaatkan secara maksimal oleh peserta untuk menggali solusi serta berbagi praktik baik.

Sri Yunita, Ketua Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum, dalam paparannya menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel memperoleh nilai akhir IKPA sebesar 93,05% untuk DIPA BPHN Semester I TA 2025.

“Alhamdulillah, ini merupakan capaian yang tergolong cukup baik, mengingat pada tahun 2025 ini beberapa rincian output baru dapat direalisasikan mulai bulan keempat. Hal tersebut berdampak pada keterlambatan realisasi anggaran,” ungkap Sri Yunita.

Ia menambahkan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari kolaborasi dan sinergi yang baik antara pelaksana kegiatan, bendahara, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun strategi penyerapan anggaran.

Salah satu strategi yang diterapkan Kanwil Kemenkum Kalsel adalah pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran setelah Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun, disepakati, dan ditetapkan. Realisasi anggaran dipantau secara berkala oleh Tim Keuangan dan PPK untuk memastikan kesesuaian dengan RPD yang telah dirancang.

“Kekompakan dan komunikasi aktif antara Tim Keuangan, PPK, dan pelaksana menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran,” tambahnya.

Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja anggaran pada Semester II TA 2025. Evaluasi ini menjadi bahan refleksi dan pembelajaran bagi seluruh pihak agar pelaksanaan anggaran ke depan semakin tepat sasaran dan tepat waktu, serta mendorong peningkatan nilai IKPA secara berkelanjutan.



Warisan Rasa dari Desa Tirawan Kotabaru: Kemenkum Kalsel Dampingi Langkah Strategis Menuju Sertifikasi IG Nasional



Kotabaru, KI_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan kegiatan pendampingan pemeriksaan substantif permohonan Indikasi Geografis (IG) Gula Aren Tirawan di Kabupaten Kotabaru, Rabu (30/07/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian penting dari proses pendaftaran IG yang bertujuan memastikan kesesuaian data, karakteristik khas produk, serta keterkaitan geografis dan budaya dari Gula Aren Tirawan sebelum pemeriksaan substantif oleh Tim Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Tim dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan KI bersama Tim Layanan KI, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Camat Pulau Laut Sigam Pia Widya Laksmi, perwakilan Bapperida dan Bappeda Kotabaru, Kepala Desa Tirawan, serta jajaran Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Aren Tirawan.

Pendampingan dilakukan langsung di Desa Tirawan dengan kunjungan ke tiga titik utama produksi. Di lokasi pertama, tim mewawancarai Misrin, penyadap dan pengolah gula aren berpengalaman, membahas proses penyadapan hingga teknik pengolahan. Lokasi kedua melibatkan Ibu Kasrun yang mengelola aspek pengemasan, kualitas produk, hingga distribusi. Sedangkan titik ketiga difokuskan pada kearifan lokal bersama Pandi, termasuk penggunaan bahan alami seperti lasoo serta tantangan produksi harian.

Metode pendampingan mencakup wawancara terstruktur, survei lapangan terhadap kondisi kebun aren dan fasilitas pengolahan, serta koordinasi intensif dengan MPIG guna menyusun dokumen IG yang komprehensif.

Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan rapat evaluasi sebagai persiapan akhir menjelang pemeriksaan substantif oleh DJKI. Tim juga akan memantau kelengkapan dokumen serta melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan.

Kehadiran Kemenkum Kalsel dalam proses ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung pelestarian dan perlindungan produk-produk unggulan daerah melalui kekayaan intelektual berbasis komunal.



Kemenkum Kalsel Fasilitasi Harmonisasi Empat Raperda Inisiatif DPRD Kota Banjarmasin, Dorong Kesejahteraan dan Inovasi Daerah



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) memfasilitasi pelaksanaan Rapat Harmonisasi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Kota Banjarmasin yang digelar pada Kamis (31/7) di Balai Pertemuan Garuda.

Harmonisasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut permohonan DPRD Kota Banjarmasin melalui surat Sekretaris DPRD Nomor 100.3.2/508/SET-DPRD/2025. Adapun empat Raperda yang dibahas meliputi:

Raperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Pedagang Kecil; Raperda tentang Sertifikasi Makanan Sehat dan Halal; Raperda tentang Keolahragaan; dan Raperda tentang Riset dan Inovasi Daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, melalui Eryck Yulianto selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya yang memimpin rapat menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah untuk memastikan tidak adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif DPRD Kota Banjarmasin yang mendorong lahirnya produk hukum daerah yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam pemberdayaan pedagang kecil, perlindungan konsumen, penguatan sektor olahraga, serta pengembangan riset dan inovasi,” ujar Eryck.

Rapat harmonisasi ini turut dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Banjarmasin, Tim Penyusun Naskah Akademik, serta perwakilan dari sejumlah SKPD terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Banjarmasin, Husaini, menyampaikan bahwa keempat Raperda tersebut merupakan respons atas kebutuhan nyata masyarakat Kota Banjarmasin dalam berbagai sektor pembangunan.

“Raperda ini bukan sekadar inisiatif legislatif, tapi cerminan aspirasi masyarakat yang ingin melihat hadirnya regulasi yang konkret dan berdampak. Kita ingin pedagang kecil dilindungi, konsumen merasa aman, generasi muda bisa mengakses sarana olahraga dengan layak, dan riset menjadi bagian dari pembangunan daerah,” tutur Husaini.

Ia menambahkan, Raperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Pedagang Kecil diharapkan menjadi landasan hukum dalam menciptakan iklim usaha yang adil serta mendorong kemitraan antara pelaku usaha kecil dan besar. Sementara Raperda Sertifikasi Makanan Sehat dan Halal bertujuan melindungi konsumen dari risiko makanan yang tidak layak atau tidak sesuai dengan prinsip kehalalan.

Raperda Keolahragaan difokuskan pada penguatan sistem pembinaan dan penyediaan sarana olahraga yang merata, dan Raperda Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk membangun ekosistem inovasi yang terintegrasi, mendukung daya saing daerah, serta mendorong kemajuan berbasis pengetahuan.

Dengan fasilitasi harmonisasi dari Kanwil Kemenkum Kalsel, diharapkan keempat Raperda ini dapat segera ditetapkan dan diimplementasikan sebagai kebijakan strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarmasin.



Sinergi Optimal antar Instansi, Kanwil Kemenkum Kalsel Terima Kunjungan Kantor Pajak



Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi antarinstansi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima kunjungan dari perwakilan Kantor Pajak Pratama Banjarmasin, Kamis (31/07). Kunjungan ini membahas kendala teknis yang dihadapi terkait penggunaan aplikasi Coretax dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan satuan kerja.

Kehadiran tim dari Kantor Pajak Banjarmasin diterima oleh Bendahara Pengeluaran Kanwil Kemenkum Kalsel, Mellisa Yunida, bersama perwakilan dari Kanwil Kementerian HAM Kalimantan Selatan, Sasha Candha Jzazili.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi terkait sejumlah hambatan yang dialami dalam penggunaan aplikasi Coretax, mulai dari proses pelaporan, validasi data, hingga pelaksanaan transaksi pajak melalui sistem tersebut. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menyampaikan berbagai permasalahan teknis sekaligus mencari solusi yang efektif dan terintegrasi.

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan ini, dalam waktu dekat Kanwil Kemenkum Kalsel akan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek). Kegiatan tersebut direncanakan menghadirkan narasumber langsung dari Kantor Pajak Banjarmasin guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para pengelola keuangan di lingkungan Kemenkum Kalsel.

Diharapkan melalui kerja sama ini, kendala yang selama ini dihadapi dapat segera teratasi, serta pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan lebih optimal sesuai regulasi yang berlaku.



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Evaluasi IKPA Semester I TA 2025 di Lingkungan Setjen



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara virtual, Rabu (31/7).

Kegiatan ini diikuti oleh Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kanwil Kemenkum Kalsel dari Ruang Rapat Tata Usaha dan Umum secara virtual. Evaluasi bertujuan untuk meninjau kembali capaian kinerja anggaran pada semester pertama serta mendorong perbaikan dan peningkatan pengelolaan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum.

Kegiatan diawali dengan pemaparan dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal terkait gambaran umum kinerja anggaran Kementerian Hukum selama Semester I Tahun 2025. Beberapa indikator yang menjadi fokus dalam evaluasi ini meliputi Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP dan TUP, serta Capaian Output.

Selanjutnya, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap IKPA di lingkungan Sekretariat Jenderal yang mencakup 33 Kantor Wilayah serta Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menetapkan strategi percepatan pelaksanaan anggaran pada semester berikutnya dan memastikan seluruh satuan kerja bekerja sesuai prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Melalui keikutsertaan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta mendukung pencapaian target kinerja Kementerian Hukum secara menyeluruh.





Dukung Pembangunan Daerah, Kemenkum Kalsel Bahas Dua Ranperda Tanah Bumbu



Banjarmasin – Kamis (31/07/2025), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan rapat harmonisasi dua rancangan peraturan daerah (ranperda) bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah dan dipimpin oleh Bahjatul Mardhiah selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya.

Dua Ranperda yang dibahas dalam forum ini adalah Ranperda tentang Kerja Sama Daerah dan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025–2029.

Dalam pengantarnya, Bahjatul menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa setiap substansi norma dalam Ranperda telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

“Melalui forum ini, kami berharap adanya penyempurnaan baik dari sisi substansi maupun teknis penyusunan, sehingga Ranperda yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjawab kebutuhan hukum daerah secara efektif,” jelasnya.

Jajaran perancang pada Kantor Wilayah turut memberikan berbagai masukan teknis dalam proses penyelarasan norma, termasuk penyusunan ketentuan umum, asas pembentukan peraturan, hingga redaksional pasal-pasal substantif.

Ranperda tentang Kerja Sama Daerah disusun sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menjalin kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga, maupun lembaga luar negeri demi peningkatan pelayanan publik dan optimalisasi potensi daerah. Sementara itu, Ranperda RPJMD 2025–2029 menjadi dokumen strategis pembangunan jangka menengah yang akan menjadi pedoman arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Rapat harmonisasi ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dalam mendorong penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas, aspiratif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jelang Pemeriksaan Substantif Akhir 6 Agustus 2025, Gula Aren Tirawan Dapat Sentuhan Final dari Tim Kanwil Kemenkum Kalsel



Kotabaru, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual terus mendorong percepatan perlindungan Indikasi Geografis (IG) Gula Aren Tirawan Kabupaten Kotabaru. Hal ini ditunjukkan dengan fasilitasi rapat evaluasi finalisasi dokumen deskripsi IG yang digelar Rabu (30/7) di Ruang Meeting Winfood Resto, Kotabaru.

Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari pemeriksaan substantif lapangan yang telah dilakukan sebelumnya oleh tim DJKI di Desa Tirawan. Dalam rapat evaluasi tersebut, dibahas secara mendalam catatan perbaikan yang harus dilakukan, termasuk penyempurnaan aspek teknis seperti karakteristik khas produk, proses produksi, serta keterkaitan geografis dan budaya yang menjadi kekuatan utama dari Gula Aren Tirawan sebagai produk indikasi geografis.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Kalsel, Riswandi, bersama Tim Layanan KI serta Ketua dan Tim Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Aren Tirawan. Hadir pula perwakilan dari Bapperida Kotabaru, Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, dan unsur lainnya yang tergabung dalam tim percepatan IG.

“Kami telah menyampaikan berbagai masukan teknis berdasarkan temuan di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan dokumen deskripsi IG memenuhi standar dan siap diverifikasi secara daring oleh DJKI pada tanggal 6 Agustus mendatang,” ujar Riswandi.

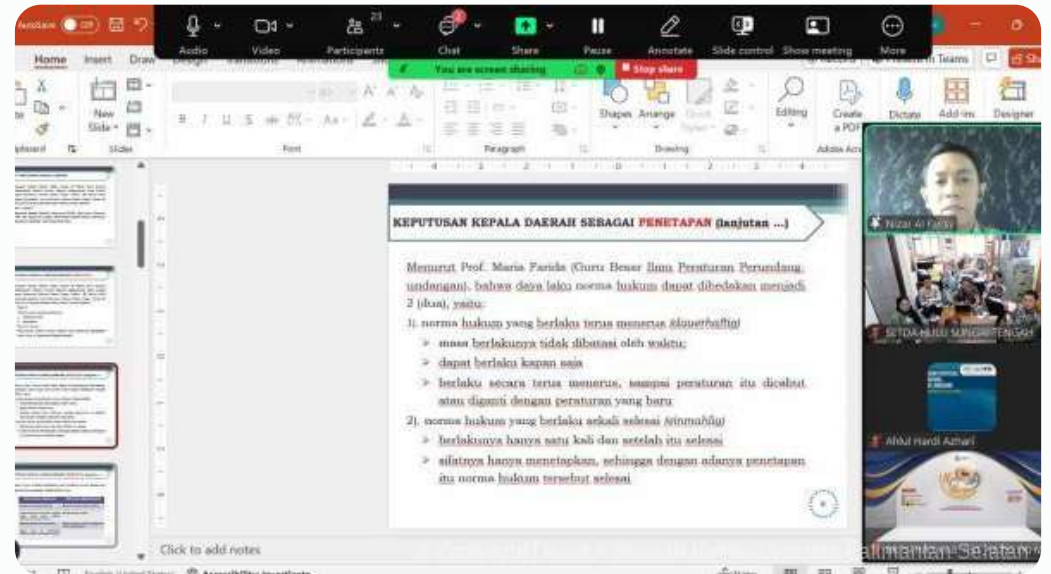
Ia menambahkan, MPIG Gula Aren Tirawan telah menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti perbaikan dan melengkapi dokumen paling lambat tanggal 1 Agustus 2025. Dokumen ini menjadi elemen krusial dalam memperoleh pengakuan resmi sebagai produk indikasi geografis, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai tambah dan perlindungan hukum bagi produk Gula Aren Tirawan.

“Perlindungan IG bukan sekadar label, tapi bentuk pengakuan terhadap identitas lokal yang memiliki keunikan dan potensi pasar. Ini bagian dari strategi jangka panjang untuk mendorong ekonomi lokal melalui kekayaan intelektual,” tegas Riswandi.

Dengan dukungan penuh dari Kanwil Kemenkum Kalsel dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan daerah, Gula Aren Tirawan diharapkan segera memperoleh sertifikat Indikasi Geografis dan membuka peluang lebih luas dalam pengembangan pasar serta pelestarian tradisi lokal.



Keputusan Bupati Tak Bisa Asal Teken, Pemkab HST Kolaborasi Bersama Kemenkum Kalsel Tingkatkan Wawasan



Banjarmasin, P3H_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) berkolaborasi dalam memberikan penguatan perancangan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dengan berperan sebagai narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan secara virtual oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten HST, Kamis (31/7)25).

Kegiatan ini ditujukan untuk menambah wawasan dalam pembentukan dan penyusunan Keputusan Kepala Daerah (Keputusan Bupati) dengan melibatkan peserta dari jajaran Bagian Hukum serta perwakilan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten HST.

Nizar Al Farisy selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda hadir secara virtual mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan sebagai narasumber untuk menyampaikan paparan utama para kesempatan ini. Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu bentuk produk hukum daerah yang bersifat konkret, individual, dan final. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Dalam pemaparannya, Nizar menjelaskan secara teoretis perbedaan mendasar antara bentuk pengaturan (regeling) dan penetapan (beschikking), serta menekankan pentingnya landasan kewenangan dalam pembentukan Keputusan Kepala Daerah. Disampaikan pula bahwa pembentukan keputusan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mencerminkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Adapun dari segi teknis penyusunan, Keputusan Kepala Daerah harus mengikuti metode penyusunan peraturan perundang-undangan secara mutatis mutandis, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

“Kami berterima kasih karena telah diberikan pencerahan dan pemahaman seputar penyusunan Keputusan Bupati, dan dengan ini semakin memperkaya khazanah keilmuan kami dan akan menjadi bekal di jajaran Bagian Hukum maupun pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam membentuk Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan, yang mana pembentukannya dilakukan dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penomoran, penandatanganan, pendokumentasian, pengotentifikasian, sampai dengan penyebarluasan,” ujar Taufik Rahman, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Sesi diskusi yang berlangsung setelah pemaparan berlangsung aktif, dengan berbagai pertanyaan yang dilontarkan peserta mengenai penyusunan Keputusan Bupati yang baik agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tetap taat asas. Sejumlah peserta juga menyampaikan kendala yang dihadapi dalam implementasi keputusan yang telah ditetapkan.



**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](https://www.kemenkumkalsel.go.id)



[@kemenkumkalsel](https://twitter.com/kemenkumkalsel)



kalsel.kemenkum.go.id